

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

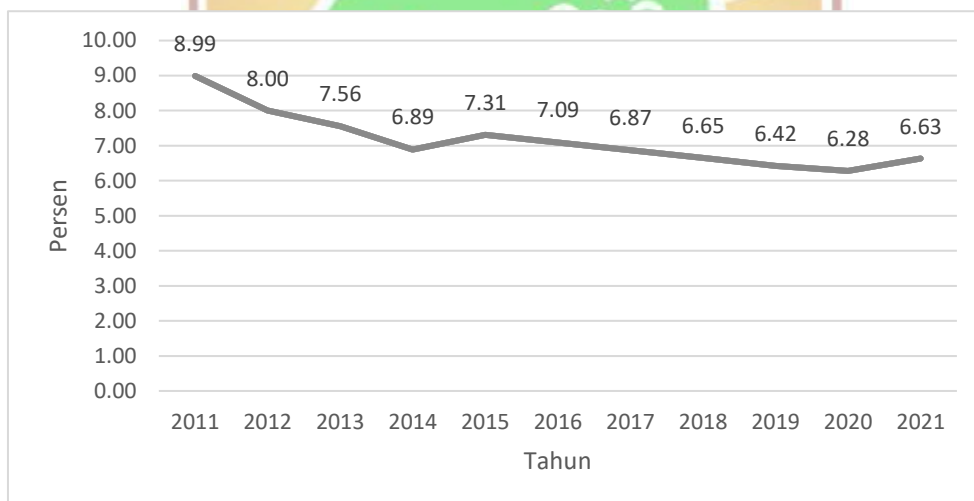
Dalam sebuah negara, pengembangan perekonomian bertujuan untuk menyejahterakan penduduk. Hal ini ditangani dengan menanggulangi masalah pembangunan dan sosial ekonomi yang ada. Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya ekonomi suatu wilayah yaitu kemiskinan. Jika saat ini pembangunan dijadikan alat ukur oleh semua warga negara serta terlepas dari faktor atribusinya (Pemberian wewenang pemerintahan), maka pembangunan ekonomi adalah standar yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa kemajuan yang terjadi pada masyarakat akan menciptakan suatu hal yang menjadi peran utama dalam salah satu tujuan bagi pemerintah Indonesia pada sektor pembangunan. Hal tersebut tentu tidak luput dari kendala yang nantinya akan dihadapi dalam kondisi pencapaian tujuan utama pembangunan tersebut oleh pemerintah Indonesia, kendala tersebut adalah dalam bentuk suatu ketimpangan pembangunan daerah. Selama ini hanya terfokus di daerah perkotaan dan mengenyampingkan masyarakat pedesaan. Ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan inilah yang menjadi pemicu terjadinya kemiskinan (Harahap, 2019).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan di dalam perekonomian, karena kemiskinan menjadi suatu permasalahan sulit dan kompleks serta yang memiliki sifat multidimensional. Kemiskinan merupakan faktor yang melatar belakangi permasalahan kesejahteraan, seperti tidak mampunya untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, keadaan isolasi, ketergantungan, pembatasan akses terhadap pelayanan sosial, hingga perlu adanya solusi atau kebijakan untuk mengatasi meningkatnya angka kemiskinan serta perlu komprehensif dan terintegrasi.

Pada lima tahun terakhir yakni tahun 2018-2021 terjadi fluktuasi pada persentase penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia sebesar 9,66%, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,22%. Akan tetapi, di tahun 2020 mengalami peningkatan

menjadi 10,19% dan mengalami penurunan kembali, dimana tingkat kemiskinan sebesar 7,60 % pada tahun 2021 (*Badan Pusat Statistik, 2021*).

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang menjadikan kemiskinan sebagai suatu masalah yang utama, karena kemiskinan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara luas, kemiskinan tidak hanya sebagai suatu bentuk dimensi dalam perekonomian tetapi juga dikatakan kemiskinan dalam hal pendapatan. Kemiskinan selalu dikonseptualisasikan dalam latar belakang ekonomi Artinya, kurangnya penghasilan serta kekayaan dalam mencukupi kebutuhan primer dalam hal sandang, pangan, dan papan, pengetahuan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya, definisi kemiskinan tidak hanya sebatas turunnya penghasilan serta kekayaan (Bappenas, 2018).



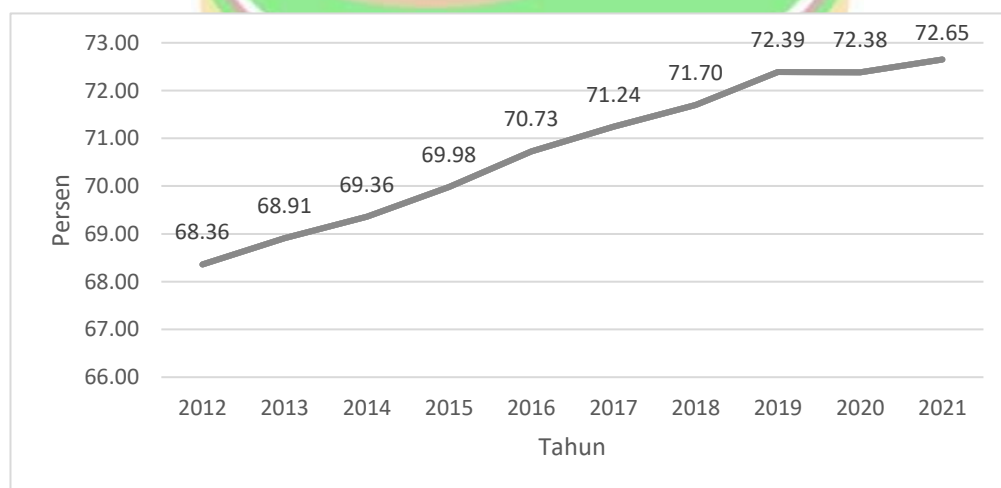
Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021

Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dalam 2011-2014 menurun yaitu di tahun 2012 dengan angka 8,99% dan 6,89% pada tahun 2014. Selanjutnya pada terjadi peningkatan pada tahun 2015 menjadi 7,31%. Lalu, terjadi penurunan yang signifikan kembali pada tahun 2016 hingga 2020 menjadi 6,28%. Akan tetapi, pada tahun 2021 persentase Kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 6,63%. Berdasarkan jabaran dari gambar diatas, keadaan ini secara tersirat menyatakan bahwa kemiskinan masih sulit untuk diatasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia disini didefinisikan sebagai suatu bentuk proses dan meningkatkan pilihan seseorang (*a process of enlarging people choices*), serta suatu bentuk taraf dari upaya yang telah dilalui dipaparkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Menghasilkan seseorang yang mempunyai pengetahuan dan skill serta pengalaman dapat menjadi penentu pembangunan perekonomian suatu negara. Pembentuk modal manusia dimulai dengan peningkatan tingkat pendidikan, yang akan mempengaruhi perolehan kesempatan kerja, dan selanjutnya kesempatan kerja akan meningkat, produktivitas juga nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran dari kualitas sumber daya manusia yang diukur dari beberapa komponen diantaranya pengetahuan, kesehatan dan daya beli dari masyarakat. Todaro (2011) menemukan bahwa kesehatan itu penting untuk meningkatkan daya produksi, selain itu kesehatan juga sangat penting untuk keberhasilan pendidikan. Dapat di ambil kesimpulan semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka kemungkinan menurunnya angka kemiskinan juga semakin besar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ketika tingkat IPM rendah angka kemiskinan akan menurun (Fadila & Marwan, 2020).



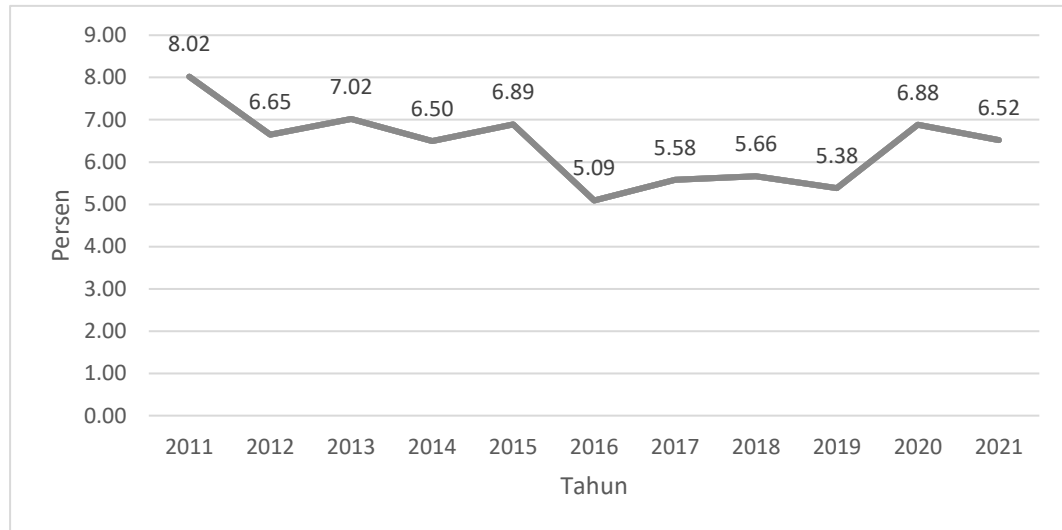
Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat Tahun 2011-2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat berada dalam fase peningkatan di tahun 2011-2019 yang menunjukkan nilai sebesar 68,36 - 72,39. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 72,38. kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 72,65. Dari data diatas didapatkan bahwa IPM di Sumatera Barat cenderung terjadi peningkatan dibandingkan penurunan.

Selain Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan yaitu pengangguran, sebab rendahnya tingkat pengangguran menjadi keberhasilan ekonomi sebuah negara dan dapat diukur sebagai indikator pembandingan kinerja ekonomi suatu negara. Penurunan dan peningkatan terus terjadi tiap tahunnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa pengangguran merupakan suatu permasalahan yang membutuhkan solusi dari pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta (Mulyadi, 2016).

Sebagian besar wilayah di Sumatera Barat memiliki masalah yang sama yaitu ketenagakerjaan. Hal ini dapat berhubungan dengan berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh terhadap ekonomi seperti tingkat pendidikan, peningkatan ekonomi, dan upah. Sumatera Barat mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan, akan tetapi harus berhadapan dengan berbagai permasalahan, terkhususnya pada bidang ketenagakerjaan, atau pengangguran, salah satunya adalah pengangguran pendidikan. Pengangguran dianggap menjadi suatu fenomena rendahnya tingkat kesejahteraan. Permasalahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya kurangnya pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, pertumbuhan penduduk dan pemerataan pendapatan, serta pemerataan kesempatan kerja (Kurnianto et al., 2018).



Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021

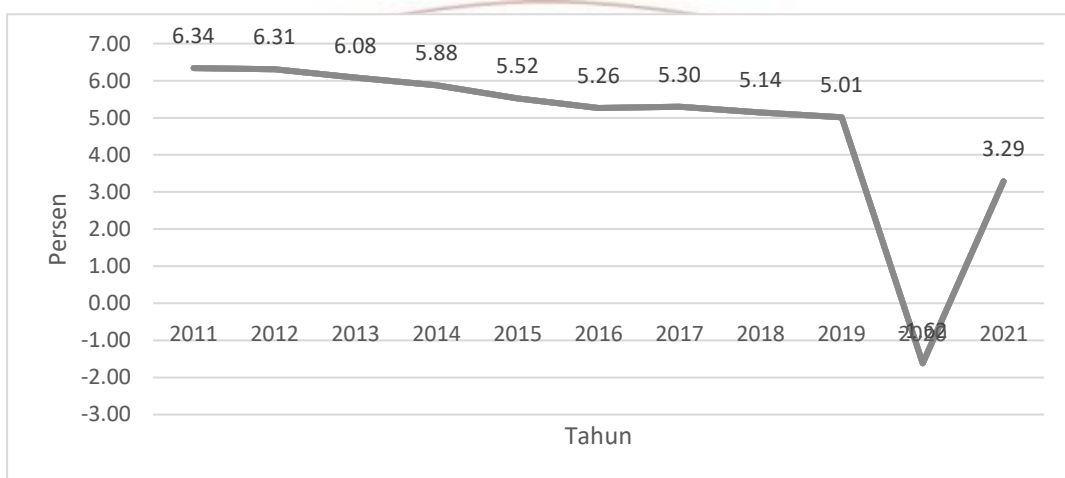
Berdasarkan gambar diatas mendapatkan bahwa Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat menurun dari tahun 2011 menuju 2012, kemudian mengalami peningkatan pada fase 2012-2013 yang berada pada angka 6,65%-7,02%. Lalu terjadinya penurunan sebesar 6,50% di tahun 2014 dan terjadi peningkatan kembali menjadi 6,89% pada tahun 2015. Selanjutnya dalam rentang waktu 2016-2020 selalu terjadi naik turunnya tingkat pengangguran di Sumatera Barat, hingga akhirnya di tahun 2021 terjadi penurunan pada angka 6,52%.

Pengangguran yang meningkat akan memberikan dampak terhadap proses pengembangan ekonomi. Agar tidak berkelanjutan, pemerintah harus mengupayakan pengentasan pengangguran, hal ini disebabkan karena pengangguran menjadi persoalan utama dan sensitive terhadap kestabilan ekonomi serta keamanan negara. Adanya pengangguran akan memunculkan pengaruh yang sangat berbahaya apabila tidak diatasi.

Selain Tingkat Pengangguran Terbuka, selanjutnya Petumbuhan Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan, Pertumbuhan Ekonomi diperlukan dalam menginterpretasikan dinamika ekonomi suatu daerah dengan melihat akselerasi perekonomian daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan kenaikan permintaan barang dan jasa. Dalam artian lain, dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa masyarakat, kemiskinan dapat dikurangi secara tidak

langsung dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Dapat dikatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan pada perekonomian suatu daerah yang dilihat berdasarkan PDRB (Rita & Diah, 2015)

Selain itu, perekonomian dapat dikatakan terjadi pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dan jasanya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator penting pada perekonomian sebuah negara, hal ini disebabkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka tidak akan terjadi peningkatan pada kesejahteraan, kesempatan kerja produktivitas dan distribusi pendapatan (Rahardja & Manurung, 2005).



Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2011-2021

Berdasarkan gambar diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam jangka tahun 2011-2016 terjadi penurunan dengan menunjukkan persentase sebesar 6,34% dan 5,26%. Selanjutnya terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2017 menjadi 5,30%. Namun, terjadi penurunan kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menjadi -1,62%. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 3,29%

Berdasarkan fenomena diatas secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat seberapa besar pengaruh pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka serta Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan, yang menjadikan hal ini sebagai sebuah isu yang menarik sekali untuk diteliti. Dengan sebab itu, disini peneliti membuat sebuah riset yang berkaitan dengan topik tersebut berjudul

“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk penjelasan dari berbagai fenomena yang terdapat pada Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Sumatera Barat, sehingga hal yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka didapatkan suatu tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: Untuk mengkaji pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai sumber bahkan referensi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kemiskinan.

2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah terkhusus bagi Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat dalam suatu bentuk upaya untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Manfaat untuk akademis.

Diharapkannya penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk acuan bagi para peneliti selanjutnya, serta diharapkan serta dipercaya bahwa penelitian selanjutnya akan dapat memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.